

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan uraian penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini :

1. **Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi dan Gerianta Wirawan Yasa (2017)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi peserta PROPER tahun 2012-2015 sejumlah 208 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan kinerja lingkungan, sedangkan variabel dependen menggunakan *environmental disclosure*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu kinerja lingkungan dengan variabel dependen yaitu *environmental disclosure*. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan-perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi peserta PROPER, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. **Geert J. M. Braam, Lisanne Uit de Weerd, Mara Hauck, and Mark A.J. Huijbregts (2016)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *environmental performance* dan *external assurance* terhadap *corporate environmental reporting*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan publik dan *private* di Belanda selama periode tiga tahun (2009-2011) sejumlah 209 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu *environmental performance* dan *external assurance*, sedangkan variabel dependen menggunakan *corporate environmental reporting*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *environmental performance* dan *external assurance* berpengaruh positif terhadap *corporate environmental reporting*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu *environmental performance* dengan variabel dependen yaitu *corporate environmental reporting*. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *external assurance*, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan-perusahaan publik dan *private* di Belanda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

3. **Sri Supatminingsih dan Monot Wicaksono (2016)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bersertifikasi ISO 14001 pada tahun 2013-2014 sejumlah 30 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu dewan komisaris (ukuran dewan, jumlah komisaris independen, jumlah rapat komisaris), dan komite audit (ukuran komite audit, keberadaan komite audit independen, jumlah rapat komite audit) sedangkan variabel dependen menggunakan pengungkapan lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan, jumlah komisaris independen, jumlah rapat komisaris, ukuran komite audit, keberadaan komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat komisaris) dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran komite audit, keberadaan komite audit independen, jumlah rapat komite audit sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bersertifikasi ISO 14001, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

4. Badingatus Solikhah dan Arga Mustika Winarsih (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, komisaris independen, keragaman *gender*, *multiple directorships*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Variabel independen yang digunakan yaitu liputan media, kepekaan industri, komisaris independen, keragaman *gender*, *multiple directorships*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen menggunakan kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

kepekaan industri, *multiple directorship* dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Lain hal pada liputan media, keragaman *gender* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu komisaris independen dan ukuran dewan komisaris independen dengan variabel dependen yaitu kualitas pengungkapan lingkungan. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen liputan media, kepekaan industri, keragaman *gender*, *multiple directorships* dan kepemilikan institusional, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance* dan jumlah rapat dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

5. Halmawati dan Dwi Oktalia (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *environmental performance* terhadap *corporate social responsibility*. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2012 dan diperoleh sebanyak 239 perusahaan.

Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan *environmental performance*, sedangkan variabel dependen menggunakan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu *environmental performance* dengan variabel dependen yaitu *corporate social responsibility*. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

6. Pradesta Ariningtika dan Endang Kiswara (2013)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012 dan diperoleh sebanyak 38 perusahaan pertambangan. Variabel independen yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit

sedangkan variabel dependen menggunakan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Sementara itu, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan perusahaan. Perbedaan pada penelitian ini :

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance* dan ukuran komisaris independen.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

7. Arifur Khan, Mohammad Badrul Muttakin dan Javed Siddiqui (2013)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Populasi yang

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) Bangladesh tahun 2005-2009 dan diperoleh sebanyak 135 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, *public ownership*, kepemilikan asing, proporsi komisaris independen, *CEO duality* dan komite audit, sedangkan variabel dependen menggunakan *corporate social responsibility disclosure*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *public ownership*, kepemilikan asing, proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility disclosure*, serta *CEO duality* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu proporsi komisaris independen dengan variabel dependen yaitu *corporate social responsibility disclosure*. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, *public ownership*, kepemilikan asing, *CEO duality* dan komite audit, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance* ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris..
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) Bangladesh, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

8. **Bahtiar Effendi, Lia Uzliawati dan Agus Sholikhhan Yulianto (2012)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011 dan diperoleh sebanyak 222 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris, sedangkan variabel dependen menggunakan *environmental disclosure*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris dengan variabel dependen yaitu *environmental disclosure*. Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen latar belakang pendidikan presiden komisaris, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

9. Kathleen Rupley, Darrell Brown, and Scott Marshall (2012)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *good governance* dan *media coverage* terhadap *environmental disclosure*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan industri di U.S selama periode enam tahun (2002-2005), sebanyak 127 perusahaan. Variabel independen yang digunakan yaitu *good governance* dan *media coverage*, sedangkan variabel dependen menggunakan *environmental disclosure*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *media coverage* berpengaruh secara positif terhadap *environmental disclosure*. *Independent commissionaire*, *gender diversity* dan *multiple directorships* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, namun *separation of the CEO from the board chair position* dan *the existence of a corporate social responsibility committee* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu komisaris independen dengan variabel dependen yaitu *environmental disclosure*.

Perbedaan pada penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan *gender diversity*, *multiple directorships*, *separation of the CEO from the board chair position* dan *the existence of a corporate social responsibility committee*, sedangkan pada penelitian sekarang menguji *environmental performance*, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan-perusahaan industri di U.S, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

10. Martin Surya Mulyadi dan Yunita Anwar (2012)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *board independence*, *institutional ownership* dan profitabilitas terhadap *corporate social responsibility*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel independen yang digunakan yaitu *board independence*, *institutional ownership* dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen menggunakan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *board independence* dan *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Sementara itu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu *board independence* dengan variabel dependen yaitu *corporate social responsibility*. Perbedaan pada peneliti ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *institutional ownership* dan profitabilitas, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *environmental performance*, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan

pertambahan yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER.

Berikut hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini:

Tabel 2.1
Matriks Penelitian

NO	PENELITI	VARIABEL DEPENDEN	VARIABEL INDEPENDEN			
			EP	BS	IND	RAKOM
1.	Ayu P. dan Yasa (2017)	<i>Environmental Disclosure</i>	B+	-	-	-
2.	Braam et al. (2016)		B+	-	-	-
3.	Supatminingsih dan Wicaksono (2016)		-	TB	TB	TB
4.	Solikhah dan Mustika W. (2016)		-	B+	B-	-
5.	Halmawati dan Oktalia (2015)		TB	-	-	-
6.	Ariningtika dan Kiswara (2013)		-	-	TB	B+
7.	Khan et al. (2013)		-	-	B+	-
8.	Bahtiar et al. (2012)		-	TB	TB	TB
9.	Effendi et al. (2012)		-	-	B	-
10.	Mulyadi dan Anwar (2012)		-	-	TB	-

Sumber : Lampiran 1 (Data diolah)

Keterangan :

EP : *Environmental Performance*

BS : *Board Size*

IND : Komisaris Independen

RAKOM : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Stakeholder

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1983:31). Freeman (1984:25) menyatakan bahwa:

“*Stakeholder* sebagai *any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective*. Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan suatu organisasi.”

Stakeholder yaitu pihak-pihak yang bekepentingan dalam suatu perusahaan seperti pemegang saham, pemerintah, kreditor, *supplier*, masyarakat, analis dan pihak lain yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap informasi pada laporan perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri (2014), teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya, sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Kouhy dan Adams dalam Ghozali dan Chariri (2014) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Menurut Deegan dalam Ghozali dan Chariri (2014) mengatakan *stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Besar kecilnya *power* yang dimiliki atas sumber tersebut menentukan *power stakeholder* perusahaan, dimana *power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Lebih lanjut menurut Ulmann dalam Ghozali dan Chariri (2014) mengatakan bahwa organisasi yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Hubungan teori *stakeholder* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *stakeholder* memiliki peranan penting dalam mendukung segala aktivitas perusahaan. Sebagaimana tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer perusahaan dalam melakukan pengelolaan yang lebih efektif di dalam lingkungan perusahaan dan dalam hal meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*. Salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan yaitu perusahaan wajib melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan kepada *stakeholder* dalam instrumen laporan keuangan tahunannya.

2.2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan :

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara hubungan *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberik wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua sisi kepentingan yang berbeda yaitu pihak agen (manajemen) dan pihak prinsipal (pemegang saham). Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan terhadap dua kepentingan tersebut, salah satu cara yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dimana di dalamnya terdapat *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Agency theory menunjukkan adanya masalah insentif yang dapat disebabkan karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara kontrak yang dibuat oleh *principal* dan *agent* dalam suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976),

memaparkan bahwa pemegang saham yang menanamkan investasinya pada perusahaan menginginkan adanya pengembalian yang lebih besar dan cepat atas apa yang telah diinvestasikan, sedangkan manajer dalam menjalankan perusahaan menginginkan kepentingannya diakomodasi oleh pemegang saham dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerja manajer tersebut. Jensen dan Meckling (1976) membagi *agency cost* sebagai berikut: 1) *The monitoring expenditures by principal*, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal berupa insentif manajemen untuk pemantauan dan memastikan *agent* selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal sebagai akibat dari adanya pendelegasian sebagai wewenang dari *principal* kepada *agent*. 2) *The bonding expenditures by the agent*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan *principal*. 3) *The residual loss*, yang merupakan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* akibat adanya perbedaan keputusan yang diambil antara *agent* dan *principal*.

Hubungan teori *agency* dalam penelitian ini sebagaimana dewan komisaris yang merupakan proksi dari mekanisme *good corporate governance*, yang mana dengan penerapan *good corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi masalah teori agensi karena dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan melalui keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Pernyataan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wawo, 2010) yang menyatakan bahwa dengan berjalannya fungsi

dewan komisaris secara efektif dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan manajemen. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan kepada pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab agen sebagai manajemen perusahaan untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan.

2.2.3 Environmental Disclosure

Environmental Disclosure merupakan salah satu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Suratno et al., 2006 dalam Nofianti et al., 2015). *Environmental disclosure* merupakan bagian dari *corporate social responsibility* (CSR), yang mana pengungkapan CSR terdiri dari pengungkapan ekonomi, lingkungan dan sosial. *Environmental disclosure* mulai berkembang sejalan dengan perkembangan *corporate social responsibility* oleh perusahaan-perusahaan publik. Perundang-undangan yang mengacu pada tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 1 ayat 3, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengungkapan lingkungan dapat diukur menggunakan sistem standarisasi internasional bidang sistem manajemen lingkungan atau ISO (*International*

Organization for Standardization) 14001 yang merupakan sertifikasi manajemen lingkungan yang diperoleh perusahaan yang telah memenuhi standar internal dan dikeluarkan oleh pihak kompeten (Supatminingsih dan Wicaksono, 2016). Perusahaan yang berupaya untuk menerapkan ISO 14001 dianggap telah memiliki komitmen untuk memperbaiki secara terus menerus kinerja lingkungannya dan perusahaan yang mendapatkan sertifikasi setelah melalui penilaian khusus, dapat dikatakan telah melakukan kinerja lingkungan sesuai standar internasional. *Global Reporting Initiative* yang merupakan pionir dalam pengembangan kerangka kerja pelaporan *sustainability* yang berisikan laporan ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai pembanding laporan keuangan (Siregar et al., 2013). *Global Reporting Initiative* (GRI-G4) merupakan laporan terakhir (laporan keempat) yang dipublikasikan di tahun 2013, berupa *checklist* atau daftar pernyataan-pernyataan yang berisi *item-item* pengungkapan informasi lingkungan perusahaan yang digunakan sebagai panduan pengumpulan data. Indeks GRI memiliki format paling lengkap dalam menyediakan informasi (Setyorini dan Suranta, 2015). Hal ini dapat membantu perusahaan dalam membuat pelaporan yang lebih relevan dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi kepada para investor terkait informasi yang dibutuhkan. Tingkat pengungkapan lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ED = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{\text{Total Skor GRI}}$$

Pengukuran pengungkapan lingkungan dapat juga menggunakan *item* pengungkapan lingkungan yang dibuat berdasarkan peraturan BAPEPAM No.

VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian *item*. Terdapat 78 *item* pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan pengungkapan lingkungan terdiri dari 13 *item* pengungkapan, energi terdiri dari 7 *item* pengungkapan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari 8 *item* pengungkapan, lain-lain tentang tenaga kerja terdiri dari 29 *item* pengungkapan, produk terdiri dari 10 *item* pengungkapan, keterlibatan masyarakat terdiri dari 9 *item* pengungkapan, dan umum terdiri dari 2 *item* pengungkapan. Pendekatan untuk menghitung tingkat pengungkapan lingkungan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap *item* pengungkapan lingkungan diberi nilai 1 apabila diungkapkan, dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Rumus perhitungan pengungkapan lingkungan berdasarkan peraturan BAPEPAM No. VIII.G.2 adalah sebagai berikut:

$$IP_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

- IP_j : Pengungkapan lingkungan perusahaan j
 $\sum X_{ij}$: Jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan j
 n_j : Jumlah *item* untuk perusahaan j, $n_j < 13$

2.2.4 *Environmental Performance*

Environmental performance atau kinerja lingkungan yaitu suatu kinerja perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung akan mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih banyak dalam laporan tahunannya (Aulia dan Agustina, 2015). Kinerja

lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER), yang mana merupakan suatu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan pengawasan dengan mekanisme *public disclosure*. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2011 pasal 1 bahwa Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna yaitu warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan adalah hijau dan emas. Adanya peringkat PROPER, aktivitas perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan diharapkan dapat lebih transparan dalam pengungkapan informasi lingkungan.

Kinerja lingkungan perusahaan juga dapat diukur dengan sertifikasi ISO 14001 yang merupakan sertifikasi terhadap Sistem Manajemen Lingkungan yang baik. Sertifikasi ini menjadi bukti kelayakan suatu organisasi atau bisnis dalam menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan telah mendedikasikan sistem manajemennya berdasarkan kesadaran lingkungan. Pengukuran dengan ISO 14001 menggunakan *dummy variable*, nilai 1 akan diberikan bagi perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISO 14001, dan nilai 0 untuk perusahaan yang belum bersertifikasi ISO 14001. Pelaksanaan program sertifikasi ISO 14001 dapat

dikatakan sebagai tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari para konsumen (Siregar et al., 2013).

2.2.5 Dewan Komisaris

Karakteristik dewan komisaris meliputi ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris.

2.2.5.1 Ukuran Dewan Komisaris (*Board Size*)

Dewan komisaris merupakan inti dari *coporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Supatminingsih dan Wicaksono, 2016). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 114 ayat 3 UU Perseroan Terbatas dikatakan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha

perseroan. Perhitungan dalam ukuran dewan komisaris yang disimbolkan dengan “BS” merupakan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu laporan tahunan perusahaan.

2.2.5.2 Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Bapepam No. 29/PM/2004 komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan. Menurut Supatminingsih dan Wicaksono (2016) bahwa keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial yang tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 III 1.4 yang telah diatur Bursa Efek Jakarta dijelaskan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Perhitungan dewan komisaris independen disimbolkan dengan “IND” yang merupakan jumlah dewan komisaris yang tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan. Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}}$$

2.2.5.3 Rapat Dewan Komisaris

Mendukung terlaksananya tugas dewan komisaris secara maksimal, dewan komisaris perlu mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan (Ariningtika dan Kiswara, 2013). Dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan *corporate governance guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Perhitungan rapat dewan komisaris yang di simbolkan “RAKOM” yaitu diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama satu tahun.

2.2.6 Pengaruh *Environmental Performance* Terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan akan melakukan tindakan dan kerja sama dengan para *stakeholder* untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Kinerja lingkungan menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam

mengungkapkan informasi terkait lingkungannya dan merupakan tindakan yang baik untuk perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan para *stakeholder* dan calon investor baru. Semakin banyak peran perusahaan dalam kegiatan lingkungannya, maka akan semakin banyak yang harus diungkapkan perusahaan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukan dalam laporan tahunannya. Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan penilaian PROPER. Apabila nilai PROPER yang di peroleh perusahaan semakin tinggi maka pengungkapan lingkungan yang dinilai dengan kriteria GRI-G4 juga akan semakin tinggi pula (Ayu P. dan Yasa, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Braam et al. (2016) *environmental performance* mempunyai hubungan positif dengan *environmental disclosure*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Ayu P. dan Yasa (2017), menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Halmawati dan Oktalia (2015) *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

2.2.7 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*

Adanya jumlah anggota dewan komisaris yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan tentunya semakin efektif sehingga dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan manajemen. Beragamnya keahlian dan pengalaman (*experience and*

expertise) yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris maka diharapkan dewan komisaris memberi arahan atas pengelolaan perusahaan. Semakin baiknya pengelolaan perusahaan diharapkan pengungkapan lingkungan juga semakin luas diungkapkan sehingga sesuai harapan *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan Solikhah dan Mustika W. (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Berbeda halnya dengan penelitian Supatminingsih dan Wicaksono (2016) dan Effendi et al. (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

2.2.8 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Environmental Disclosure*

Komisaris independen sebagaimana melalui peranannya dalam fungsi pengawasan, juga akan memantau manajemen agar keputusan yang diambil tidak merugikan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan tata kelola bagi perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja dewan komisaris mampu melakukan pengawasan yang semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan (Ariningtika dan Kiswara, 2013). Hasil penelitian Khan et al. (2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan hasil pada

penelitian Sholikhah dan Mustika W. (2016) komisaris independen memiliki pengaruh negatif. Tidak selaras dengan penelitian dari Supatminingsih dan Wicaksono (2016), Ariningtika dan Kiswara (2013), Effendi et al. (2012) dan Mulyadi dan Anwar (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

2.2.9 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*

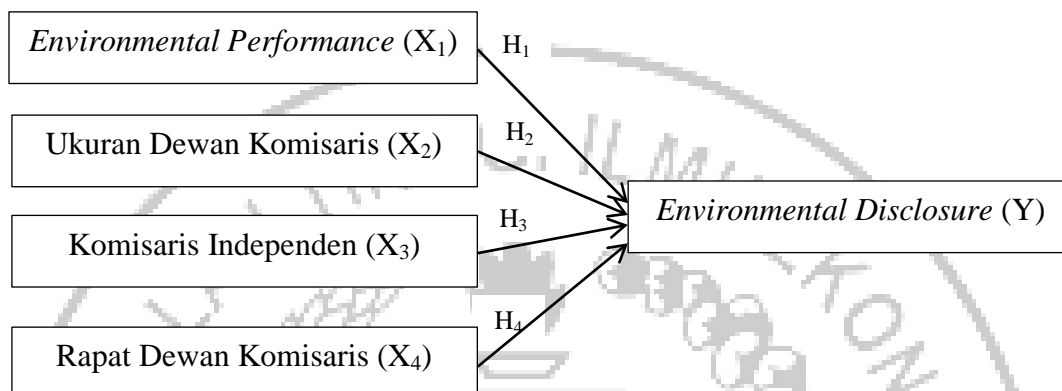
Rapat dewan komisaris yang dilakukan secara berkala dan berbobot maka akan memberikan nilai tambah terutama dalam meningkatkan ketaatan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka semakin efektifnya fungsi pengawasan, sehingga pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Ariningtika dan Kiswara (2013) bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Supatminingsih dan Wicaksono (2016) dan Effendi et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini *environmental performance*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris sebagai variabel

independen yang mempengaruhi *environmental disclosure* sebagai variabel dependen. Maka dapat dibangun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah

2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : *Environmental performance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

H₃ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

H₄ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*